

# PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KKKS PERTAMINA EP CEPU TAHUN BUKU 2016

Ario Seno Nugroho

Kepabeanan dan Cukai, Politeknik  
Keuangan Negara STAN

Email : ario\_sn@iuj.ac.jp

## Abstrak

Dalam suatu siklus manajemen, pemeriksaan adalah satu usaha yang dilakukan oleh manajemen, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai regulator dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas di Indonesia, memerlukan alat pengawasan dalam kegiatan ini. Salah satu bentuk alat pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kerja Sama (KKKS) yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Pelaksanaan pemeriksaan ini dapat dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan unit yang memiliki kapasitas pemeriksaan. SKK Migas dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan di atas. Pada sisi SKK Migas, kerjasama ini memungkinkan perluasan cakupan pengawasan, sedangkan bagi PKN STAN, hal ini adalah salah satu bentuk pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada kegiatan ini, bentuk kerjasama adalah pemeriksaan kepatuhan pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kerja Sama (KKKS) - Pertamina EP Cepu Tahun Buku 2016. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi aspek pengadaan, kapasitas nasional, pengelolaan aset, dan kepabeanan.

Kata Kunci: pemeriksaan kepatuhan, SKK Migas, pengelolaan rantai suplai

## Abstract

*In the management cycle, audit is a management tool to assure that the organization goal will be achieved. Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) as a Government body in regulating the exploration and exploitation in Oil and Gas Industry, needs an audit tool to control those activities. One instrument which SKK Migas can utilize is a compliance audit in the cooperation contractor supply chain, which works together with Indonesia government in exploration and exploitation. This audit could be done by SKK Migas itself or cooperate with a body which has audit capability. SKK Migas with Polytechnic of State Finance STAN (PKN STAN) arrange a cooperation to perform this audit. As a SKK Migas side, this cooperation broader the audit coverage, and in the PKN STAN, this is a form of community service as a university three dharma. In this activity, the cooperation form is a compliance audit in the cooperation contractor supply chain – Pertamina EP Cepu for book ended 2016. This audit cover four areas, those are: procurement, national capacity, asset management, and customs.*

Keywords: compliance audit, SKK Migas, supply chain management

## PENDAHULUAN

Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, mencerminkan kewajiban yang harus dilaksanakan Politeknik Keuangan Negara STAN dalam mencerdaskan anak bangsa dan memberikan kontribusi positif secara langsung kepada negara. Sesuai dengan asas Tri Dharma yang ketiga, yakni pengabdian masyarakat, maka tanggung jawab Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN adalah mengaplikasikan ilmu dimiliki kepada masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut Politeknik Keuangan Negara STAN membuat sebuah memorandum of understanding (MoU) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman nomor MOU-0007/SKKO0000/2015/S0 dan PRJ-30/PKN/2015.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Perpres 9, 2013)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKK Migas yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pengawasan penggunaan komponen dalam negeri serta pengawasan pengelolaan aset dan kepabeanaan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2017 bagian keempat, pasal 61 bahwa Deputy Pengendalian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, rantai suplai, tingkat komponen dalam negeri, monitoring dan analisis biaya, serta pengelolaan aset barang milik negara yang dikelola oleh KKKS. (Permen ESDM 17, 2017)

Divisi Pengelolaan Rantai Suplai mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan rantai suplai KKKS. Serta merujuk pada Surat Perintah Deputy Pengendalian Pengadaan Nomor: PRI-0001/SKKMH0000/2017/S7 tanggal 4 Juli 2017, SKK Migas melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan rantai suplai KKKS Tahun Buku 2016. Dengan maksud untuk menilai ketaatan dan kepatuhan KKKS Pertamina EP Cepu dalam

mengelola dan melaksanakan rantai suplai berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola (PTK) Nomor: PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kedua Revisi-03. (PTK 007 Buku Kedua Rev-03, 2015)

## Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan penyusunan PTK 007 Rev. 03 yang mencakup percepatan dan penyederhanaan proses tender, peningkatan keutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri, serta penerapan sistem akuntabilitas pelaku pengadaan barang/jasa. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan rantai suplai KKKS Pertamina EP Cepu yang meliputi kegiatan post-audit. Wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas pengadaan, manajemen aset dan kepabeanaan, serta peningkatan kapasitas nasional. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan Pemeriksaan Kepatuhan KKKS (post audit) atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan rantai suplai yang meliputi:

- a. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa dan Pemberdayaan Kapasitas Nasional Sesuai ketentuan dalam PTK-007 Buku Kesatu Revisi-02 dan Buku Kedua Revisi-03. (PTK 007 Buku Kesatu Rev-02, 2015) (PTK 007 Buku Kedua Rev-03, 2015)
- b. Aspek Pengelolaan Aset Sesuai Ketentuan dalam PTK-007 Buku Ketiga. (PTK 007 Buku Ketiga, 2015)
- c. Aspek Pengelolaan Kepabeanaan Sesuai Ketentuan dalam PTK-007 Buku Keempat. (PTK 007 Buku Keempat, 2015)

## Sasaran/Target Kegiatan

Terdapat empat aspek yang menjadi fokus pemeriksaan kepatuhan dalam kegiatan ini. Keempat aspek tersebut meliputi aspek pengadaan barang dan jasa (PBJ), aspek kapasitas nasional (kapnas), aspek manajemen aset, dan aspek kepabeanaan. Penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini.

### a. Aspek Pengadaan

Pemeriksaan terkait aspek pengadaan mencakup ketidakpatuhan terhadap PTK 007 Buku Kesatu Revisi-02 dan Buku Kedua Revisi-03 serta kriteria lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mengungkap dan memastikan adanya penyusunan dokumen tender yang tidak jelas dan rawan menimbulkan multitafsir, adanya persyaratan tender dan spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan persetujuan SKK Migas, adanya persyaratan tender dan spesifikasi yang mengarah pada vendor tertentu, serta untuk

memastikan penyusunan dokumen tender telah sesuai prinsip dasar Pengelolaan Rantai Suplai.

b. Aspek Kapasitas Nasional (Kapnas)

Pemeriksaan terkait aspek kapnas bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan TKDN dalam kegiatan operasional KKKS telah dipatuhi, meliputi apakah KKKS telah memaksimalkan penggunaan barang/jasa dan SDM dalam negeri, pengungkapan mengenai pengawasan realisasi TKDN yang tidak maksimal, penggunaan TKDN yang tidak sesuai ketentuan, maksimalisasi penggunaan TKDN, dan memastikan kepatuhan terkait pengadaan barang wajib yang telah sesuai dan memenuhi kategori barang wajib sebagaimana mestinya.

c. Aspek Manajemen Aset

Pemeriksaan terkait aspek manajemen aset bertujuan untuk memastikan bahwa perlakuan atas material persediaan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan/penghapusan, dan pengecekan fisik, telah sesuai dengan ketentuan PTK 007 Buku Ketiga Revisi-01.

d. Aspek Kepabeanaan

Pemeriksaan atas aspek kepabeanaan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses kegiatan impor atas Barang Operasi Perminyakan (BOP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, realisasi nilai dan volume BOP yang diimpor telah sesuai dengan nilai dan volume Surat Keputusan Pembebasan, proses pelaksanaan ekspor barang yang dilakukan oleh KKKS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan proses pindah lokasi dan alih tanggung jawab atas Barang Operasi Perminyakan (BOP) telah sesuai dengan PTK 007 Buku Keempat Revisi-01 dan kriteria-kriteria lain yang berlaku.

### Metodologi Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kerja Sama (KKKS) dapat dikategorikan sebagai bentuk audit kepatuhan yaitu suatu audit untuk menentukan apakah *auditee* telah mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditentukan oleh otoritas yang lebih tinggi. (Arens, Elder, Beasley, 2012)

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dalam audit ini ditujukan untuk memperoleh bukti audit dalam bentuk :

1. Pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi atau penghitungan atas barang berwujud
2. Dokumentasi, yaitu inspeksi atas pencatatan dokumen oleh *auditee*
3. Penghitungan ulang, yaitu pemeriksaan ulang perhitungan yang dilakukan oleh *auditee*

4. Observasi, yaitu penggunaan panca indera untuk menilai kegiatan perusahaan (Arens, Elder, Beasley, 2012)

## PEMBAHASAN

### Metode Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Sumber dana untuk kegiatan audit kepatuhan ini bersumber dari anggaran SKK Migas. Pembayaran ke PKN STAN menggunakan mekanisme kontrak pekerjaan. PKN STAN merupakan Badan Layanan Umum, selain menyelenggarakan program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan calon aparatur sipil negara bidang keuangan negara juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan diklat dan jasa konsultasi untuk Kementerian/Lembaga, BUMN/S, Pemerintah Daerah, dan perorangan.

### Ruang Lingkup

Audit Kepatuhan (Compliance Audit) dilakukan terhadap KKKS Pertamina EP Cepu untuk Tahun Buku Periode 2016 dengan waktu pelaksanaan mulai 4 Agustus 2017 sampai dengan 15 September 2017, dengan dasar dan lingkup pemeriksaan:

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan PTK-007/SKKO2000/2015/SO Buku Kesatu Revisi-02 dan Buku Kedua Revisi-03 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS;

- a. Pengelolaan Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai ketentuan PTK-007/SKKO2000/2015/SO Buku Kedua Revisi-03 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai KKKS;
- b. Pengelolaan Aset KKKS sesuai dengan PTK Nomor: 007/REVISI-I/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Aset; dan
- c. Pengelolaan kepabeanaan sesuai dengan PTK Nomor 007/PTK/VI/2009 tentang Pengelolaan Kepabeanaan.

Metodologi pemeriksaan kontrak adalah menggunakan sampel/populasi.

a. Pemeriksaan fisik

1. Pengelolaan Aset

Menghitung jumlah barang di lapangan dan membandingkan dengan jumlah yang dilaporkan.

2. Aspek Kepabeanaan

Kesesuaian jumlah fisik dengan dokumen *masterlist*.

b. Dokumentasi

1. Aspek Pengadaan dan Kapasitas Nasional

Dokumen diperiksa:

- Kontrak/PO/SO

2. Aspek Pengelolaan Aset

Dokumen diperiksa:

- Laporan Material

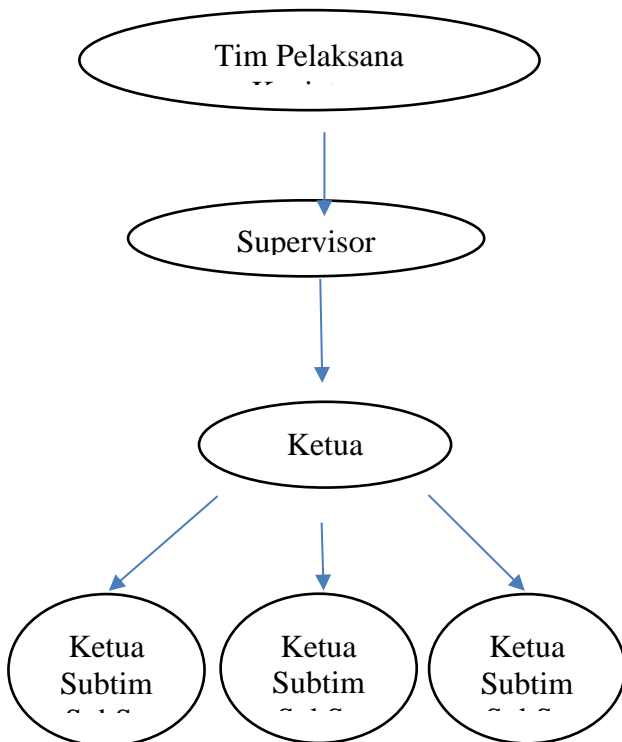
- Delivery Order

- Standard Operating Procedure
  - Log Book
3. Aspek Kepabeanaan
- Dokumen diperiksa:
- Dokumen Masterlist (RKBI, RIB, SKEP)
  - Dokumen Pindah Lokasi/Alih Tanggung Jawab
  - Standard Operating Procedure
  - Log Book
- c. Penghitungan Ulang
1. Aspek Pengadaan dan Kapasitas Nasional
- Dokumen diperiksa:
- Kontrak/PO/SO
2. Aspek Pengelolaan Aset
- Dokumen diperiksa:
- Laporan Material
- d. Observasi
1. Aspek Pengadaan dan Kapasitas Nasional
- Pemeriksaan implementasi kontrak
2. Aspek Pengelolaan Aset
- Kesesuaian dengan aturan pengelolaan aset
3. Aspek Kepabeanaan
- Kesesuaian dengan ketentuan Masterlist

### Pelaksana Kegiatan

#### Susunan Pelaksana Tugas

Pelaksana Pemeriksaan KKKS Pertamina EP Cepu terdiri dari supervisor, ketua tim/sub tim, dan tiga anggota tim. Pelaksana pemeriksaan terdiri dari dosen (supervisor) dan mahasiswa program Diploma IV.



**Gambar 1**  
**Struktur Susunan Pelaksana Tugas**

### Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan

Uraian tugas untuk masing-masing anggota pelaksana kegiatan, adalah sebagai berikut:

#### a. Supervisor mempunyai tugas:

- Melakukan pembimbingan atas keseluruhan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Tim Audit yang berasal dari PKN STAN.
- Melakukan supervisi atas hal-hal yang mencakup:
  1. Pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) atau Prosedur Audit;
  2. Penataan Kertas Kerja Audit;
  3. Perumusan Temuan Audit;
  4. Komunikasi Hasil Audit.
    - Menjalankan fungsi konsultasi dalam hal pelaksanaan audit.
    - Melakukan pemantauan intensif atas pelaksanaan audit.
    - Mengawasi dan menjalankan fungsi Quality Control (QC) atas pelaksanaan dan hasil audit.
    - Melakukan reviu atas hasil audit.
    - Mengarahkan administrasi pelaksanaan audit.

#### b. Ketua Tim/Subtim Audit mempunyai tugas:

- Melaksanakan audit sesuai dengan penugasannya
- Mengumpulkan dan menganalisis data penyusunan audit
- Membantu mengomunikasikan audit program ke Anggota Tim
- Memberi tugas kepada Anggota Tim
- Mengawasi Anggota Tim
- Membantu menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas dan intern tim.
- Melakukan audit sesuai dengan audit program.
- Melakukan reviu atas realisasi audit dengan audit programnya yang dilakukan Anggota Tim
- Menyusun simpulan hasil audit
- Menyusun konsep laporan hasil audit.

#### c. Anggota Tim Wewenang mempunyai tugas:

- Mempelajari audit program.
- Membicarakan dan menerima penugasan dari Ketua Tim.
- Melaksanakan audit sesuai dengan audit program.
- Membuat kertas kerja audit.
- Membuat simpulan hasil audit yang menjadi tugasnya.
- Membantu Ketua Tim menyusun konsep hasil audit.

### Tahapan Kegiatan, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi PTK 007

Para mahasiswa dan supervisor mengikuti sosialisasi dari SKK Migas sebelum pelaksanaan audit kepatuhan. Materi-materi yang diberikan di dalam sosialisasi tersebut mencakup pemaparan seputar Pedoman Tata Kelola Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 berikut gambaran umum mengenai kegiatan audit kepatuhan yang akan dilaksanakan. Tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai pembekalan kepada peserta atas penugasan berupa pemahaman terhadap proses bisnis industri migas, teknik atau metode yang dilakukan, dan kriteria yang digunakan dalam audit kepatuhan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017, bertempat di Lantai 9 Gedung City Plaza Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

### Perencanaan Pemeriksaan/ Kick Off Meeting/ Entry Meeting

Tahap awal audit kepatuhan ditandai dengan penyelenggaraan Kick Off Meeting atau Entry Meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak KKKS Pertamina EP Cepu terhadap ruang lingkup dan tujuan penugasan, sekaligus untuk memperkenalkan para peserta penugasan dengan KKKS yang menjadi objek audit/auditee. Kick Off Meeting dihadiri oleh pihak SKK Migas selaku penyelenggara, seluruh anggota tim Pertamina EP Cepu, serta perwakilan dari KKKS Pertamina EP Cepu. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2017.

### Pelaksanaan Pemeriksaan

Audit Kepatuhan dilaksanakan mulai tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 8 September 2017. Lokasi pelaksanaan kegiatan audit Pertamina EP Cepu adalah di Jakarta dan Bojonegoro (Jawa Timur)

### Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS)

Pada minggu terakhir pelaksanaan audit kepatuhan, tim menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS). LHPS berisi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria (PTK 007). LHPS disusun dalam bentuk tabel dengan format yang telah ditetapkan oleh pihak SKK Migas. Setelah disusun, LHPS diserahkan kepada KKKS untuk dipelajari agar dapat ditanggapi dalam rapat pembahasan akhir (Exit Meeting).

### Pembahasan LHPS (Exit Meeting)

Pembahasan LHPS (Exit Meeting) dilaksanakan di Hotel Atria Gading Serpong pada tanggal 12- 13 September 2017. Pembahasan dilakukan oleh tim audit PKN STAN, Tim SKK Migas, dan KKKS Pertamina EP Cepu. Mekanisme pembahasan dimulai dengan pemaparan tanggapan KKKS Pertamina EP Cepu atas temuan sementara yang termuat dalam LHPS. Kegiatan pembahasan merumuskan kesepakatan yang menghasilkan ikhtisar berupa poin-poin temuan sementara yang diangkat menjadi temuan dan poin-poin temuan sementara yang didrop. Resume permasalahan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Exit Meeting dituangkan dalam Berita Acara Exit Meeting yang ditandatangani oleh tim audit yang mencakup Tim SKK Migas dan Tim PKN STAN serta KKKS Pertamina EP Cepu sebagai pihak yang diaudit.

### Penyusunan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Berdasarkan Berita Acara Exit Meeting, tim audit menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Konsep LHP berisi latar belakang pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

Konsep LHP yang disusun oleh tim audit PKN STAN disampaikan kepada Tim SKK Migas untuk direviu. Setelah melalui proses reviu, LHP disahkan oleh Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas. LHP yang telah disahkan disampaikan kepada pimpinan KKKS Pertamina EP Cepu sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan sistem pengelolaan rantai suplai.

### Finalisasi Laporan

Kegiatan finalisasi laporan sepenuhnya menjadi wewenang dan tugas pihak Tim SKK Migas setelah menerima konsep LHP yang diserahkan oleh Tim PKN STAN. Finalisasi atau pemutakhiran LHP dilaksanakan mulai 17 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017

### Hasil Kegiatan

Audit Kepatuhan telah dilaksanakan terhadap KKKS Pertamina EP Cepu. Hasil kegiatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) yang terdiri atas:

No	Aspek Audit	Temuan Awal	Temuan didrop	Temuan Akhir
1.	Pengadaan	Ada	Ada	Ada

2.	Kapasitas Nasional	Ada	Ada	Ada
3.	Pengelolaan Aset	Ada	Ada	Ada
4.	Kepabeanan	Ada	Ada	Ada
5.	Rekomendasi			Ada

- b. Presentasi hasil audit kepada KKKS Total Indonesia di Hotel Atria Gading Serpong pada tanggal 12 - 13 September 2017.

### KESIMPULAN

Kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kerja Sama (KKKS) – Pertamina EP Cepu merupakan suatu kerjasama saling menguntungkan antara SKK Migas dan PKN STAN. Kerjasama ini memperluas wilayah cakupan pengawasan yang dapat dilakukan oleh SKK Migas, di sisi lain, PKN STAN dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Aspek yang diperiksa dalam audit kepatuhan ini adalah: pengadaan, kapasitas nasional, pengelolaan asset, dan kepabeanan.

### PUSTAKA

- Arens, A. Alvin., Elder, Randal J., Beasley, Mark S., 2012, *Auditing and Assurance Services, 14th Edition* New Jersey: Pearson Education Inc.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013<sup>11</sup> tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai KKKS Buku Kesatu Revisi 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum
- Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai KKKS Buku Kedua Revisi 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai KKKS Buku Ketiga Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Aset
- Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai KKKS Buku Keempat Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kepabeanan